

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

**Nama : Yogie Nugroho
No. Mhs : 20610372
Bagian : Hukum Tata Negara**

FAKULTAS HUKUM

SKRIPSI

PERBANDINGAN KEMENANGAN DEWAN PERMATA LAN RAIKAT
DEERAH DALAM PEMERINTAH KEPERIYADAAN DI KABUPATEN
BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004



Dijalankan Untuk Meningkatkan Kepolisian Terpadu
Guna Memberikan Gjas, Selaras pada Tujuan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dijalankan Oleh :

Nama : Yogo Ningsopo
No. Mpr : 20010375
Bogor : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2006

**PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Yogie Nugroho

No. Mhs : 20610372

Bagian : Hukum Tata Negara

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

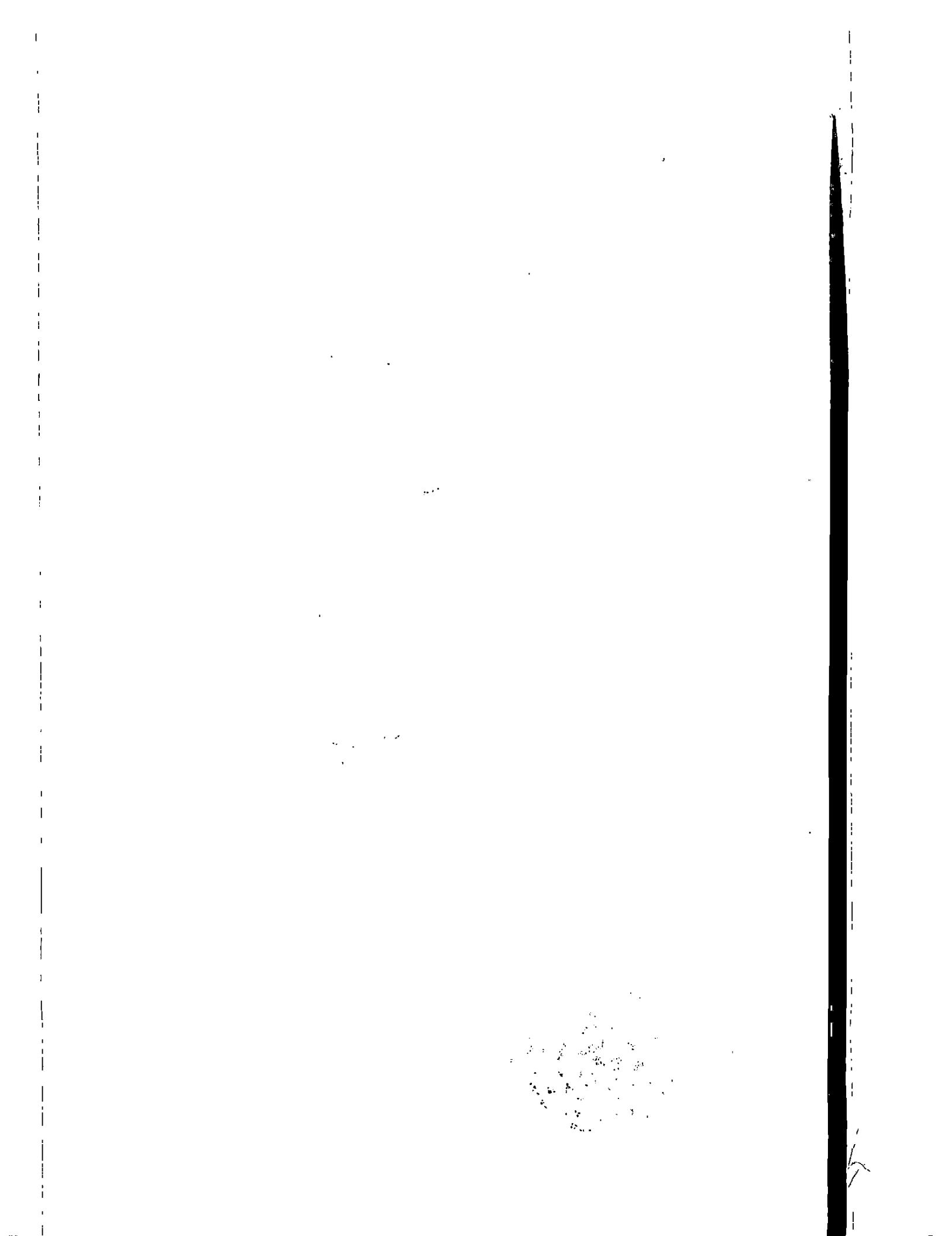
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Juli 2005

Dosen Pembimbing I


Septi Nurwijayanti, SH., MH.
NIK. 153.029

Dosen Pembimbing II


Nanik Prasetyoningsih, SH.
NIK. 153.043



HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 11 Mei 2006

Ketua



M. Haris Aulawi, SH, M.Hum

NIK. 153.011

Anggota I



Septi Nurwijayanti, SH., MH.

NIK. 153.029

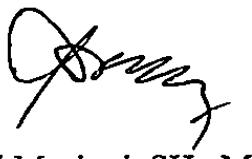
Anggota II



Nanik Prasetyoningsih, SH.

NIK. 153.043

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya, beserta (sehabis) kesulitan ada kemudahan

(Surat Asy Syarh Ayat 6)

Berdoalah sambil berusaha agar hidup jadi tak sia-sia

(Doa : Iwan Fals)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Aku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibuku Yumanah dan Bapakku Suryana, SH atas doa dan kasih sayangnya yang tiada henti. Keridloanmu yang Ananda harapan.
2. Adiku-adikku yang tersayang Yosie Fajrin, Ares Yugowiyoso, Yondri Priambudi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatka kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bantul Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Strata Satu pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini sedikit banyak masih terdapat kekurangannya baik dari segi materi, maupun dari segi tata bahasanya. Oleh sebab itu penulis akan bersedia untuk menerima kritik dan saran yang bermanfaat bagi perbaikan Skripsi ini.

Selain ungkapan rasa syukur penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing baik moral maupun material sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Atas segala bantuan dan dorongan penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor UMY
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UMY
3. Bapak Anang Sya’roni, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Wiratmanto, SH. selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Ibu Septi Nurwijayanti, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I
6. Ibu Nanik Prasetyoningsih, SH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II
7. Bapak Jastron, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Bapak Rochmat, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul.

Kepada mereka penulis hanya dapat mengucapkan berjuta terima kasih

~~dan semoga Allah memberi halasan nafala Amin~~

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	23
A. Pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	23
B. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	29
C. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	31
D. Hubungan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	31

E. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...	38
BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG	57
A. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	57
B. Prosedur dan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah	63
C. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	71
D. Pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah	78
BAB IV PERBANDINGAN KEWENANGAN DPRD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL	81
A. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.....	81
B. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.....	92
C. Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul ..	100
BAB V KESIMPULAN	103
A. Kesimpulan	103